



**KESBANGPOL**  
**PROVINSI LAMPUNG**

# **EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV | TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

---

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah disusun dan dilaksanakan selama kurun waktu Januari s.d Desember Tahun 2024 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan Tahun 2024.

Diharapkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi yang berimplementasi kepada tugas pokok dan fungsi lembaga secara optimal, serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada kurun waktu Januari s./d Desember 2024.

Bandar Lampung, Januari 2025

**KEPALA BADAN**



**Drs. M. FIRSADA, M. Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

# **DAFTAR ISI**

---

Halaman

*KATA PENGANTAR*

*DAFTAR ISI*

*DAFTAR TABEL*

*BAB I PENDAHULUAN*

- A. LATAR BELAKANG 1.1*
- B. DASAR HUKUM 1.2*
- C. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3*
- D. RUANG LINGKUP 1.4*
- E. SISTEMATIKA PENULISAN 1.4*

*BAB II PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB  
KEGIATAN PADA RENJA DENGAN PERUBAHAN  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH*

- A. CASCADING TUJUAN DAN SASARAN 11.1  
BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT  
DAERAH*
- B. KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN 11.7  
SUB KEGIATAN ANTARA PERUBAHAN RENJA  
DAN PERUBAHAN RENSTRA*
- C. PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB 11.12  
KEGIATAN, PAGU PENDANAAN, INDIKATOR,  
DAN TARGET KINERJA ANTARA PERUBAHAN  
RENJA DAN PERUBAHAN RENSTRA*
- D. PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB 11.22  
KEGIATAN, PAGU PENDANAAN, INDIKATOR,  
DAN TARGET KINERJA ANTARA PERUBAHAN*

*RENJA DAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)*

<i>BAB III</i>	<i>CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	
<i>A.</i>	<i>REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA ANGGARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024</i>	<i>III.1</i>
<i>B.</i>	<i>CAPAIAN KINERJA IKU PERANGKAT DAERAH (SASARAN PERUBAHAN RENSTRA) TRIWULAN IV TAHUN 2024</i>	<i>III.9</i>
<i>BAB IV</i>	<i>PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN</i>	
<i>A.</i>	<i>FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA</i>	<i>IV.1</i>
<i>B.</i>	<i>FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA</i>	<i>IV.2</i>
<i>C.</i>	<i>REKOMENDASI KEBIJAKAN</i>	<i>IV.2</i>
<i>BAB V</i>	<i>PENUTUP</i>	

## **DAFTAR TABEL**

		<i>Halaman</i>
Tabel II.1	Cascading Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	II.2
Tabel II.2	Kesesuaian Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	II.7
Tabel II.3	Perbandingan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	II.12
Tabel II.4	Perbandingan Perubahan Renja Tahun 2024 dan DPA Tahun 2024 Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	II.22
Tabel III.1	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di Provinsi Lampung Tahun 2024	III.1
Tabel III.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1	III. 4
Tabel III.3	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	III. 6
Tabel III.4	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2	III. 7
Tabel III.5	Realisasi Anggaran Tahun 2024	III. 8
Tabel III.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024	III. 8
Tabel III.7	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024	III. 9

Tabel III.8	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	III. 11
Tabel V.1	Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	V.1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh *stakeholder* yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya, RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolok Ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024.

## **B. DASAR HUKUM**

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dan tolok ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan IV Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode Januari s.d Desember (triwulan IV) tahun 2024 antara lain:

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;

2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024;
3. Sebagai upaya monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan periode bulan Januari s.d Desember (triwulan IV) tahun 2024 guna menganalisa pencapaian target kinerja dan keuangan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, dan indikator target kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan evaluasi renja triwulan IV tahun 2024.

##### **BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang cascading tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Renstra

Perangkat Daerah, kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan antara Renja dan Perubahan Renstra, perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator, dan target kinerja antara Renja dan Perubahan Renstra, serta perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator, dan target kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **BAB III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang realisasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024, serta capaian kinerja IKU Perangkat Daerah (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2024.

### **BAB IV. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Menguraikan faktor penghambat pencapaian kinerja, faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, serta rekomendasi kebijakan (rencana tindak lanjut).

### **BAB V. PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024.

## **BAB II**

### **PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **A. CASCADING TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005-2025 yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2007, serta mencermati potensi dan permasalahan Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024 adalah “Rakyat Lampung Berjaya”. Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mendukung pencapaian Misi ke-1 dari RPJMD yaitu: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. Cascading tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 1**  
**Cascading Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
<b>MISI 1 RPJMD: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai</b>			
<b>TUJUAN BADAN KESBANGPOL: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah</b>			
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pembentukan Paskibraka
			<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>

			<p><b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b></p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p><b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p> <p><b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b></p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p><b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b></p> <p><b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p>
--	--	--	---

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>
			<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
			<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b> <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</b>



			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**B. KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
ANTARA PERUBAHAN RENJA DAN PERUBAHAN RENSTRA**

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra OPD Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 2**  
***Kesesuaian Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra  
Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024***

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	P-RENJA	P-RENSTRA	KETERANGAN
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	√	√	Sesuai
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	√	√	Sesuai
<b>8.1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.1</b>	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.2</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	Sesuai
8.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	Sesuai

8.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.3</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	√	
8.1.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	Sesuai
8.1.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.5</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	Sesuai
8.1.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	√	√	Sesuai
8.1.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.6</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	Sesuai
8.1.1.6.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	Sesuai
8.1.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	Sesuai
8.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	Sesuai
8.1.1.6.7	Penyediaan Bahan/Material	√	√	Sesuai
8.1.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	√	
8.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.8</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	√	√	Sesuai
8.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	Sesuai
8.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	Sesuai
<b>8.1.1.9</b>	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	√	√	Sesuai

8.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	Sesuai
8.1.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	√	
8.1.1.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	Sesuai
<b>8.1.2</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	√	√	Sesuai
<b>8.1.2.1</b>	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>	√	√	Sesuai
8.1.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.1.2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	√	
8.1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.1.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.1.2.1.12	Pembentukan Paskibraka	√	-	
<b>8.1.4</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	√	√	Sesuai
<b>8.1.4.1</b>	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	√	√	Sesuai
8.1.4.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	√	√	Sesuai

8.1.4.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	√	√	Sesuai
8.1.5.1	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>	√	√	Sesuai
8.1.5.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.5.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	√	√	Sesuai
8.1.6.1	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	√	√	Sesuai
8.1.6.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.6.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.6.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai

8.1.6.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	√	√	Sesuai
8.1.6.1.6		√	√	Sesuai
8.1.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	√	√	Sesuai
8.1.3.1	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK</b>	√	√	Sesuai
8.1.3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.1.3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai

8.1.3.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
-----------	--	---	---	--------

### C. PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PAGU PENDANAAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA ANTARA PERUBAHAN RENJA DAN PERUBAHAN RENSTRA

Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra OPD Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 3**  
**Perbandingan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU P-RENSTRA		PAGU P-RENJA	
			2024		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		persen		23.018.940.132		395.975.311.693,78
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		persen		23.018.940.132		395.975.311.693,78
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	75	18.820.501.232	75	392.375.311.693,78
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	97,5	311.123.800	95	86.816.300

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen	5	145.704.000	5	15.194.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD tepat waktu	dokumen	4	31.941.600	4	11.176.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	14	20.000.000	14	12.407.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	31.941.600	4	11.590.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	20.000.000	4	10.962.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	31.941.600	12	11.994.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	14	25.595.000	14	13.489.600
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan administrasi keuangan</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>16.014.132.532</b>	<b>92,5</b>	<b>390.305.396.393,78</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	orang/bulan	51	7.029.256.532	51	6.687.497.193,78
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	Dokumen	39	8.920.800.000	39	383.573.309.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	dokumen	12	32.276.000	12	22.414.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen keuangan	laporan	18	31.800.000	18	22.176.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</b>	<b>persen</b>	<b>96</b>	<b>50.400.000</b>	<b>94</b>	<b>35.962.000</b>



Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	4	16.800.000		-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	4	16.800.000	4	24.278.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	laporan	8	16.800.000	8	11.684.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>80.400.000</b>	<b>85</b>	<b>54.430.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	6	54.000.000	180	36.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	120	13.200.000	140	12.430.000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<b>Prosentase layanan administrasi umum</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>1.463.919.200</b>	<b>85</b>	<b>1.131.295.600</b>
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	20.980.000	12	23.858.200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	36	497.527.000	1	156.676.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	11.520.000	12	27.784.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	35.000.000	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	12	30.000.000	12	20.175.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	paket	12	145.123.200	12	108.356.000
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi	laporan	60	723.769.000	60	794.446.000

<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persen</b>	<b>82,5</b>	<b>546.470.000</b>	<b>80</b>	<b>372.800.400</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	259.910.000	12	111.572.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	286.560.000	12	261.228.400
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>67,5</b>	<b>354.055.700</b>	<b>65</b>	<b>388.611.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	224.055.700	6	368.151.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	8	80.000.000		-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	100	50.000.000	30	20.460.000
<b>2 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.278.732.000</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>
<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.278.732.000</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12	53.650.000	1	9.757.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12	53.650.000		-
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	2740	1.049.272.000	60	60.270.500
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	300	116.160.000	60	21.497.500
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	15	6.000.000	7	57.107.000

	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang			33	1.651.368.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>208.619.000</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>
		<b>Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>208.619.000</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	500	180.619.000	249	200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	15	28.000.000	2	75.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>685.000.000</b>	<b>30</b>	<b>325.000.000</b>
		<b>Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>685.000.000</b>	<b>30</b>	<b>325.000.000</b>

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1400	660.000.000	425	275.000.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	15	25.000.000	15	50.000.000
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.424.735.000</b>	<b>30</b>	<b>600.000.000</b>
		<b>Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.424.735.000</b>	<b>87,5</b>	<b>600.000.000</b>
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	4	120.000.000	-	-

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1000	474.512.000	480	291.805.800
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1200	430.348.000	280	66.411.500
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	15	8.500.000	15	55.523.700
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	4	391.375.000	2	186.259.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>601.352.900</b>	<b>78,37</b>	<b>600.000.000</b>

<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK</b>	<b>Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>	persen	30	601.352.900	30	600.000.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	6	11.280.000	2	3.609.300
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	12	16.000.000	-	-

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	450	221.160.000	516	266.315.200
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	1250	342.912.900	175	79.279.900
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	15	10.000.000	8	250.795.600



**D. PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PAGU PENDANAAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA ANTARA PERUBAHAN RENJA DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)**

Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 4**  
**Perbandingan Perubahan Renja Tahun 2024 dan DPPA Tahun 2024**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Lampung**

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU P-RENJA		PAGU DPPA	
			2024		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		persen		395.975.311.693,78		396.297.134.893,78
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		persen		395.975.311.693,78		396.297.134.893,78
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	75	392.375.311.693,78	75	392.697.134.893,78
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	95	86.816.300	95	86.816.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen	5	15.194.300	5	15.194.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD tepat waktu	dokumen	4	11.176.700	4	11.176.700

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	14	12.407.400	14	12.407.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	11.590.600	4	11.590.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	10.962.800	4	10.962.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	11.994.900	12	11.994.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	14	13.489.600	14	13.489.600
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan administrasi keuangan</b>	<b>persen</b>	<b>92,5</b>	<b>390.305.396.393,78</b>	<b>92,5</b>	<b>390.627.219.593,78</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	orang/bulan	51	6.687.497.193,78	51	6.687.497.193,78
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	Dokumen	39	383.573.309.200	39	383.895.132.400
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	dokumen	12	22.414.000	12	22.414.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen keuangan	laporan	18	22.176.000	18	22.176.000

<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</b>	<b>persen</b>	<b>94</b>	<b>35.962.000</b>	<b>94</b>	<b>35.962.000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen		-		-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	4	24.278.000	4	24.278.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	laporan	8	11.684.000	8	11.684.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>54.430.000</b>	<b>85</b>	<b>54.430.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	180	36.000.000	180	36.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	140	12.430.000	140	12.430.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	orang/hari/kegiatan	110	6.000.000	110	6.000.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan administrasi umum</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>1.131.295.600</b>	<b>85</b>	<b>1.131.295.600</b>
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	23.858.200	12	23.858.200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	156.676.000	1	156.676.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	27.784.000	12	27.784.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	12	20.175.400	12	20.175.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	paket	12	108.356.000	12	108.356.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi	laporan	60	794.446.000	60	794.446.000
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>372.800.400</b>	<b>80</b>	<b>372.800.400</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	111.572.000	12	111.572.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	261.228.400	12	261.228.400
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>65</b>	<b>388.611.000</b>	<b>65</b>	<b>388.611.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	6	368.151.000	6	368.151.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	30	20.460.000	30	20.460.000

2	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>
	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>30</b>	<b>1.800.000.000</b>
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	9.757.000	1	9.757.000
	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	60	60.270.500	60	60.270.500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	60	21.497.500	60	21.497.500

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	15	57.107.000	15	57.107.000
		Jumlah Paskibraka	orang	33	1.651.368.000	33	1.651.368.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>
		<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>	<b>30</b>	<b>275.000.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	249	200.000.000	249	200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	2	75.000.000	2	75.000.000

4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	30	325.000.000	30	325.000.000
	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	persen	30	325.000.000	30	325.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	425	275.000.000	425	275.000.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	15	50.000.000	15	50.000.000
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	persen	30	600.000.000	30	600.000.000

<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>persen</b>	<b>87,5</b>	<b>600.000.000</b>	<b>87,5</b>	<b>600.000.000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	480	291.805.800	480	291.805.800
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	280	66.411.500	280	66.411.500



<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	Laporan	15	55.523.700	15	55.523.700
	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	dokumen	2	186.259.000	2	186.259.000
<p><b>6 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b></p>	<p><b>Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung</b></p>	persen	78,37	600.000.000	78,37	600.000.000
<p><b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK</b></p>	<p><b>Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>	persen	30	600.000.000	30	600.000.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	2	3.609.300	2	3.609.300
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	516	266.315.200	516	266.315.200
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	175	79.279.900	175	79.279.900

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	8	250.795.600	8	250.795.600
--	---	---------	---	-------------	---	-------------

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

#### A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA ANGGARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam rangka mencegah terjadinya potensi konflik menjadi peristiwa konflik di Provinsi Lampung sebagai tabel berikut:

Tabel III.1

#### Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	%	30	27,64	92,14
1	Seleksi Paskibraka 2024	orang	82	82	100
2	Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024	orang	51	51	100
3	Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Calon Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2024	orang	33	33	100
4	Pengukuhan Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2024	orang	33	33	100
5	Peringatan HUT RI ke-79	orang	93	93	100
6	Upacara Hari Bela Negara	orang	40	40	100
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12	12	100
8	Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Kepemudaan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme	Orang	60	70	116,67

9	Rakor FPK	Orang	55	55	100
10	Sosialisasi Bela Negara	Orang	50	0	0
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>29,62</b>	<b>98,73</b>
1	Sosialisasi Pembinaan Ormas dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Ekstrimisme yang Mengarah pada Terorisme	orang	110	110	100
2	Pembinaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Ekstrimisme yang Mengarah pada Terorisme dalam Menjaga Keutuhan NKRI	orang	125	125	100
3	Pembinaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Ekstrimisme yang Mengarah pada Terorisme dalam Menjaga Keutuhan NKRI	orang	125	125	100
4	Rapat Tim Pengawas Ormas	orang	35	30	85,71
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
1	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Pelajar di Provinsi Lampung	orang	90	90	100
2	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Pelajar di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
3	Silaturahmi dan Komunikasi Pondok Pesantren Siap Memberantas Narkoba, Mencegah Radikalisme dan Menjaga Keutuhan NKRI	orang	150	150	100
4	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Pelajar di Provinsi Lampung	Orang	260	260	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>18,3</b>	<b>61</b>
1	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 08 Provinsi Lampung	orang	26	26	100
2	Rapat Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung	Dokumen	2	2	100
3	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan	orang	260	260	100

4	Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Radikalisme dan Terorisme	orang	150	150	100
5	Rapat Koordinasi RAD PKS	Orang	140	0	0
6	Rapat Koordinasi Stabilitas dan Kewaspadaan Dini	Orang	140	0	0
<b>V</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
1	Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol se-Provinsi Lampung	Laporan	1	1	100

Capaian indikator Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 5 (lima) program dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dari target sebesar 30% terealisasi sebesar 27,64% sehingga capaian kinerja program sebesar 92,14%;
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dari target sebesar 30% terealisasi sebesar 29,62%, sehingga capaian kinerja program sebesar 98,73%;
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dari target sebesar 30% terealisasi sebesar 30%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%; dan
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari target sebesar 30% terealisasi sebesar 18,3%, sehingga capaian kinerja program sebesar 61%.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dari target sebesar 75% terealisasi sebesar 75%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 1 menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

**Tabel III.2**

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Kepemudaan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme</li> <li>• Sosialisasi Bela Negara</li> </ul>
		Pembentukan Paskibraka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi Paskibraka</li> <li>• Upacara Hari Lahir Pancasila</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Calon Paskibraka</li> <li>• Pengukuhan Paskibraka</li> <li>• Peringatan HUT RI</li> <li>• Upacara Hari Bela Negara</li> </ul>

<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b></p>	<p><b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b></p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Ormas dalam Pencegahan Radikalisme dan Ekstrimisme yang Mengarah pada Terorisme dalam Menjaga Keutuhan NKRI</li> <li>• Rapat Tim Pengawas Ormas</li> </ul>
<p><b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b></p>	<p><b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b></p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)</li> <li>• Silaturahmi dan Komunikasi Pondok Pesantren Siap Memberantas Narkoba, Mencegah Radikalisme dan Menjaga Keutuhan NKRI</li> </ul>
<p><b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b></p>	<p><b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b></p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Ekstrimisme, Terorisme dan Radikalisme</li> <li>• Pembinaan Kewaspadaan Nasional terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG)</li> </ul>



<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol se-Provinsi Lampung</li> </ul>
--	--	--	---

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang menunjang partisipasi penduduk dalam pemilu dan pilkada tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel III.3**

**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	%	<b>30</b>	<b>24,52</b>	<b>81,73</b>
1	Piket Posko Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Orang	48	48	100
2	Pembinaan kepada Partai Politik "Menuju Partai Politik yang Modern"	Orang	50	50	100
3	Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 kepada Mahasiswa	Orang	100	100	100
4	Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 kepada Mahasiswa	Orang	100	100	100
5	Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) "Pemanfaatan Data IDI Provinsi Lampung"	Orang	40	40	100
6	Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung	Orang	105	97	92,38
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	6	6	100
8	Piket Posko Pilkada	Orang	40	40	100
9	Rapat Tim Pokja IDI	Orang	30	25	83,33

10	Rapat Tim Banpol	Orang	20	0	0
11	Silaturahmi dan Penandatanganan BA Serah Terima Bankeu Parpol	Orang	80	0	0

Capaian kinerja prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih didukung oleh program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik, pada tahun 2024 dari target kinerja sebesar 30% terealisasi sebesar 24,52%, sehingga capaian kinerja sebesar 81,73%.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 2 peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

**Tabel III.4**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2**

NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piket Posko Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>• Piket Posko Pilkada</li> <li>• Rapat Tim Pokja IDI</li> <li>• Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</li> <li>• Rakor Kesiapan Pilkada</li> <li>• Sosialisasi Pilkada kepada Mahasiswa</li> </ul>

	<b>SITUASI POLITIK</b>	Situasi Politik di Daerah	
--	------------------------	---------------------------	--

Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.5  
Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	REALISASI ANGGA- RAN
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>	<b>396.297.134.893,78</b>	<b>395.128.157.215,00</b>	<b>1.168.977.678,78</b>	<b>99,71</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>396.140.458.893,78</b>	<b>394.974.807.215,00</b>	<b>1.165.651.678,78</b>	<b>99,71</b>
	Belanja Pegawai	6.687.497.193,78	6.043.069.681,00	644.427.512,78	90,36
	Belanja Barang dan Jasa	5.557.829.300,00	5.036.605.134,00	521.224.166,00	90,62
	Belanja Hibah	383.895.132.400,00	383.895.132.400,00	0	100,00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>156.676.000,00</b>	<b>153.350.000,00</b>	<b>3.326.000,00</b>	<b>97,88</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.676.000,00	153.350.000,00	3.326.000,00	97,88

Total pagu dana sebesar Rp 396.297.134.893,78 dan realisasi sebesar Rp 395.128.157.215,00 sehingga persentase realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,71%.

Dalam penyelenggaraan tugasnya membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan capaian kinerja periode bulan Januari s.d Desember (triwulan IV) tahun 2024 sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 99,71% dengan rincian sesuai tabel

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 Triwulan IV sebagai berikut:

**TABEL III. 6**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024**  
 (Tabel T-C 29 Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)						
8	01	01	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																				
8	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	75	491,682,412,712.00	70	27,536,820,733.00	75	392,697,134,893.78	72	391,890,521,735.00	96.99%	94.57%	72	419,427,342,468.00	64.56%	59.60%	---	Badan Kesbangpol		
8	01	01	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	%	97.5	905,697,400.00	85.71	257,666,600.00	98	86,816,300.00	96	86,815,900.00	100.00%	100.00%	96	344,482,500.00	77.89%	45.16%			
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	20	470,292,000.00	10	115,080,700.00	5	15,194,300.00	5	15,193,900.00	100.00%	100.00%	15	130,274,600	75.00%	27.70%		
8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	16	102,924,200.00	8	46,031,800.00	4	11,176,700.00	4	11,176,700.00	100.00%	100.00%	12	57,208,500	75.00%	55.58%		
8	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	14	60,000,000.00	4	17,811,800.00	14	12,407,400.00	14	12,407,400.00	100.00%	100.00%	18	30,219,200	128.57%	50.37%		
8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	8	58,559,600.00	0	0.00	4	11,590,600.00	4	11,590,600.00	100.00%	100.00%	4	11,590,600	50.00%	19.79%		
8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	12	60,000,000.00	4	19,618,500.00	4	10,962,800.00	4	10,962,800.00	100.00%	100.00%	8	30,581,300	66.67%	50.97%		
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	24	58,559,600.00	12	22,874,000.00	12	11,994,900.00	12	11,994,900.00	100.00%	100.00%	24	34,868,900	100.00%	59.54%		
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	56	95,362,000.00	14	36,249,800.00	14	13,489,600.00	14	13,489,600.00	100.00%	100.00%	28	49,739,400	50.00%	52.16%		
8	01	01	1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase layanan administrasi keuangan</b>	%	95	482,731,291,356.00	95	24,416,715,654.00	95	390,627,219,593.78	93	389,982,792,081.00	100.00%	97.59%	93	414,399,507,735.00	71.63%	69.77%			
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bln	204	26,620,784,356.00	102	11,911,824,596.00	51	6,687,497,193.78	51	6,043,069,681.00	100.00%	90.36%	153	17,954,894,277.00	75.00%	67.45%		
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	156	455,903,744,000.00	78	12,420,560,158.00	18	383,895,132,400.00	18	383,895,132,400.00	100.00%	100.00%	96	396,315,692,558.00	61.54%	86.93%		
8	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	48	104,000,000.00	24	43,991,300.00	12	22,414,000.00	12	22,414,000.00	100.00%	100.00%	36	66,405,300.00	75.00%	63.85%		
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	72	102,763,000.00	36	40,339,600.00	18	22,176,000.00	18	22,176,000.00	100.00%	100.00%	54	62,515,600.00	75.00%	60.83%		
8	01	01	1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</b>	%	96	96,692,000.00	96	31,779,000.00	96	35,962,000.00	96	35,962,000.00	100.00%	100.00%	96	67,741,000.00	70.83%	70.96%			
8	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	12	42,504,000.00	4	9,061,000.00	4	24,278,000.00	4	24,278,000.00	100.00%	100.00%	8	33,339,000.00	66.67%	78.44%		
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	32	54,188,000.00	16	22,718,000.00	8	11,684,000.00	8	11,684,000.00	100.00%	100.00%	24	34,402,000.00	75.00%	63.49%		
8	01	01	1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</b>	%	90	191,620,000.00	79.56	34,619,000.00	90	54,430,000.00	80	48,540,000.00	78.91%	77.34%	80	83,159,000.00	41.48%	44.03%			

NO	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang/keg	11	99,000,000.00	0	0.00	6	36,000,000.00	6	35,000,000.00	100.00%	97.22%	6	35,000,000.00	54.55%	35.35%		
8	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	240	26,400,000.00	0	0.00	113	12,430,000.00	98	10,540,000.00	86.73%	84.79%	98	10,540,000.00	40.83%	39.92%		
8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	602	66,220,000.00	174	34,619,000.00	2	6,000,000.00	1	3,000,000.00	50.00%	50.00%	175	37,619,000.00	29.07%	56.81%		
8	01	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase layanan administrasi umum</b>	%	<b>90</b>	<b>5,071,990,416.00</b>	<b>83.33</b>	<b>1,795,250,383.00</b>	<b>90</b>	<b>1,131,295,600.00</b>	<b>90</b>	<b>1,022,188,481.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.54%</b>	<b>90</b>	<b>2,817,438,864.00</b>	<b>63.45%</b>	<b>65.18%</b>		
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	48	67,617,400.00	24	29,148,000.00	12	23,858,200.00	12	23,858,200.00	100.00%	100.00%	36	53,006,200.00	75.00%	78.39%		
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	19	1,440,866,600.00	6	319,584,000.00	3	156,676,000.00	3	153,350,000.00	100.00%	97.88%	9	472,934,000.00	47.37%	32.82%		
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	48	39,193,000.00	24	17,936,300.00	12	27,784,000.00	12	27,784,000.00	100.00%	100.00%	36	45,720,300.00	75.00%	116.65%		
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	48	111,478,216.00	24	56,299,600.00	12	20,175,400.00	12	20,175,400.00	100.00%	100.00%	36	76,475,000.00	75.00%	68.60%		
8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	paket	48	517,619,200.00	4	29,988,000.00	12	108,356,000.00	12	94,138,000.00	100.00%	86.88%	16	124,126,000.00	33.33%	23.98%		
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	240	2,895,216,000.00	120	1,342,294,483.00	60	794,446,000.00	60	702,882,881.00	100.00%	88.47%	180	2,045,177,364.00	75.00%	70.64%		
8	01	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	<b>82.5</b>	<b>1,774,678,840.00</b>	<b>87.5</b>	<b>621,629,153.00</b>	<b>82.5</b>	<b>372,800,400.00</b>	<b>82.5</b>	<b>366,119,868.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.01%</b>	<b>82.5</b>	<b>987,749,021.00</b>	<b>71.88%</b>	<b>54.79%</b>		
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	48	827,318,840.00	21	242,262,453.00	12	111,572,000.00	12	104,891,468.00	100.00%	94.01%	33	347,153,921.00	68.75%	41.96%		
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	48	947,360,000.00	24	379,366,700.00	12	261,228,400.00	12	261,228,400.00	100.00%	100.00%	36	640,595,100.00	75.00%	67.62%		
8	01	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	%	<b>67.5</b>	<b>910,442,700.00</b>	<b>96.67</b>	<b>379,160,943.00</b>	<b>67.5</b>	<b>388,611,000.00</b>	<b>67.5</b>	<b>348,103,405.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.50%</b>	<b>67.5</b>	<b>727,264,348.00</b>	<b>54.75%</b>	<b>67.30%</b>		
8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit/thn	28	798,082,700.00	14	342,770,943.00	7	368,151,000.00	7	327,643,405.00	100.00%	89.00%	21	670,414,348.00	75.00%	84.00%		
8	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/thn	400	112,360,000.00	108	36,390,000.00	30	20,460,000.00	30	20,460,000.00	100.00%	100.00%	138	56,850,000.00	34.50%	50.60%		
8	01	02			<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat</b>	%	<b>30</b>	<b>4,038,918,500.00</b>	<b>25</b>	<b>1,537,619,300.00</b>	<b>30</b>	<b>1,800,000,000.00</b>	<b>30</b>	<b>1,719,751,250.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>71.65%</b>	<b>30</b>	<b>3,257,370,550.00</b>	<b>45.99%</b>	<b>39.21%</b>		
8	01	02	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pematapan ideologi dan karakter kebangsaan</b>	%	<b>30</b>	<b>4,038,918,500.00</b>	<b>25</b>	<b>1,537,619,300.00</b>	<b>30</b>	<b>1,800,000,000.00</b>	<b>30</b>	<b>1,719,751,250.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>71.65%</b>	<b>30</b>	<b>3,257,370,550.00</b>	<b>45.99%</b>	<b>39.21%</b>		
8	01	02	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	45	143,247,500.00	21	37,296,700.00	1	9,757,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	21	37,296,700.00	46.67%	26.04%		
8	01	02	1.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	5480	2,003,156,000.00	0	0.00	60	60,270,500.00	60	53,792,000.00	100.00%	89.25%	60	53,792,000.00	1.09%	2.69%		

NO	KODE				KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
8	01	02	1.03	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	5280	1,804,308,700.00	5390	1,472,782,600.00	60	21,497,500.00	60	19,269,000.00	100.00%	89.63%	5450	1,492,051,600.00	103.22%	82.69%		
8	01	02	1.04	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	57	88,206,300.00	30	27,540,000.00	15	57,107,000.00	15	47,100,800.00	100.00%	82.48%	45	74,640,800.00	78.95%	84.62%		
8	01	02	1.04	0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	0	0.00	0	0.00	33	1,651,368,000.00	33	1,599,589,450.00	100.00%	96.86%	33	1,599,589,450.00	0.00%	0.00%		
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	%	30	2,418,751,900.00	25	636,275,300.00	30	600,000,000.00	20	522,647,400.00	64.26%	61.99%	20	1,158,922,700.00	51.14%	46.94%		
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	%	30	2,418,751,900.00	25	636,275,300.00	30	600,000,000.00	20	522,647,400.00	64.26%	61.99%	20	1,158,922,700.00	51.14%	46.94%		
8	01	03	1.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	22	36,327,600.00	6	7,807,400.00	1	3,609,300.00	0	0.00	0.00%	0.00%	6	7,807,400.00	27.27%	21.49%		
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	1780	789,373,400.00	900	256,635,000.00	498	266,315,200.00	450	232,719,200.00	90.36%	87.38%	1350	489,354,200.00	75.84%	61.99%		
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	5530	1,242,650,900.00	2285	360,532,900.00	150	79,279,900.00	100	52,150,000.00	66.67%	65.78%	2385	412,682,900.00	43.13%	33.21%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	60	350,400,000.00	20	11,300,000.00	15	250,795,600.00	15	237,778,200.00	100.00%	94.81%	35	249,078,200.00	58.33%	71.06%		
	8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	%	30	813,601,300.00	25	312,378,000.00	30	275,000,000.00	30	272,932,600.00	99.37%	99.28%	30	585,310,600.00	45.92%	69.30%		
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	30	813,601,300.00	25	312,378,000.00	30	275,000,000.00	30	272,932,600.00	99.37%	99.28%	30	585,310,600.00	45.92%	69.30%		
	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	2055	606,001,300.00	470	254,204,000.00	395	200,000,000.00	390	198,420,800.00	98.73%	99.21%	860	452,624,800.00	41.85%	74.69%		
	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	60	207,600,000.00	28	58,174,000.00	2	75,000,000.00	2	74,511,800.00	100.00%	99.35%	30	132,685,800.00	50.00%	63.91%		
	8	01	05			Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	30	2,504,275,000.00	25	1,013,550,900.00	30	325,000,000.00	30	324,608,500.00	100.00%	99.84%	30	1,338,159,400.00	60.73%	54.56%		
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	%	30	2,504,275,000.00	25	1,013,550,900.00	30	325,000,000.00	30	324,608,500.00	100.00%	99.84%	30	1,338,159,400.00	60.73%	54.56%		
	8	01	05	1.01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	5615	2,254,275,000.00	2633	923,534,100.00	444	275,000,000.00	444	274,711,000.00	100.00%	99.89%	3077	1,198,245,100.00	54.80%	53.15%		
	8	01	05	1.01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	60	250,000,000.00	25	90,016,800.00	15	50,000,000.00	15	49,897,500.00	100.00%	99.80%	40	139,914,300.00	66.67%	55.97%		



NO	KODE				KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	8	01	06		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	30	4,532,739,200.00	25		30	600,000,000.00	30	397,695,730.00	50.52%	45.78%	30	1,679,586,547	42.36%	39.85%		
	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	30	4,532,739,200.00	25		30	600,000,000.00	30	397,695,730.00	50.52%	45.78%	30	1,679,586,547	42.36%	39.85%		
					Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	18	340,000,000.00	2	100,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	2	100,000,000.00	11.11%	29.41%		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	3700	1,544,278,800.00	1875	423,034,300.00	480	291,805,800.00	460	259,810,800.00	95.83%	89.04%	2335	682,845,100.00	63.11%	44.22%		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	5000	1,417,297,200.00	1220	460,572,667.00	280	66,411,500.00	75	15,459,400.00	26.79%	23.28%	1295	476,032,067.00	25.90%	33.59%		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	60	122,267,200.00	30	34,108,850	15	55,523,700.00	12	40,212,730.00	80.00%	72.42%	42	74,321,580.00	70.00%	60.79%		
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	12	1,108,896,000.00	4	264,175,000	2	186,259,000.00	1	82,212,800.00	50.00%	44.14%	5	346,387,800.00	41.67%	31.24%		
<b>TOTAL</b>									<b>505,990,698,612.00</b>		<b>31,036,644,233.00</b>	<b>75</b>	<b>396,297,134,893.78</b>	<b>75</b>	<b>395,128,157,215.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.71%</b>		<b>427,446,692,265.00</b>	<b>51.78%</b>	<b>51.58%</b>		

**B. CAPAIAN KINERJA IKU PERANGKAT DAERAH (SASARAN PERUBAHAN RENSTRA) TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024 disajikan pada tabel III.2 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2024.

**Tabel III.7**

**Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2024		CAPAIAN
				Target	Realisasi	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	100,00	100,00	100,00
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka	80,00	79,28	99,10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024. Pada indikator kinerja prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung kinerja mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada

indikator kinerja prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih masih berada dibawah target yang ditetapkan.

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya. Sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung memiliki 1 indikator yaitu Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara. Sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik memiliki 1 indikator, yaitu Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan realisasi sebesar 79,28 dari target sebesar 80 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,10%. Data prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih menggunakan data hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 15 (lima belas) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2024. Prosentase ini diperoleh dari perhitungan prosentase rata-rata partisipasi pemilih di 15 (lima belas) kabupaten/kota. Adapun total jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel III.8****Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Prosentase
1	Lampung Selatan	796.779	617.758	77,53%
2	Lampung Tengah	1.020.141	790.305	77,47%
3	Lampung Utara	479.467	370.758	77,33%
4	Lampung Barat	223.066	184.176	82,57%
5	Tulang Bawang	306.767	231.918	75,60%
6	Tanggamus	451.682	356.684	78,97%
7	Lampung Timur	822.906	633.446	76,98%
8	Way Kanan	346.258	285.928	82,58%
9	Pesawaran	344.903	284.419	82,46%
10	Pringsewu	318.314	260.969	81,98%
11	Mesuji	169.997	133.150	78,32%
12	Tulang Bawang Barat	220.698	177.882	80,60%
13	Pesisir Barat	119.655	97.741	81,69%
14	Bandar Lampung	790.125	581.399	73,58%
15	Metro	128.370	104.666	81,53%
<b>Rata-rata partisipasi</b>				<b>79,28%</b>

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **A. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Adapun yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung antara lain:

1. Pluralitas masyarakat Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak dan benar.
2. Masih adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat.
3. Masih ada organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya merata sehingga kesenjangan ekonomi tersebut memungkinkan mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi.
5. Tingkat pendidikan politik masyarakat di Provinsi Lampung yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

## **B. FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Adapun yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yaitu Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik.

## **C. REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Dalam rangka perbaikan dan pengembangan selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa.
2. Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme.
4. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi.
5. Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.

## BAB V

### P E N U T U P

Dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 (Januari s.d Desember 2024) realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

**Tabel V.1**  
**Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.
1	2	3	4	5
I	<b>BELANJA</b>	<b>396.297.134.893,78</b>	<b>395.128.157.215,00</b>	<b>1.168.977.678,78</b>
I	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>396.140.458.893,78</b>	<b>394.974.807.215,00</b>	<b>1.165.651.678,78</b>
	Belanja Pegawai	6.687.497.193,78	6.043.069.681,00	644.427.512,78
	Belanja Barang dan Jasa	5.557.829.300,00	5.036.605.134,00	521.224.166,00
	Belanja Hibah	383.895.132.400	383.895.132.400,00	0
II	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>156.676.000,00</b>	<b>153.350.000,00</b>	<b>3.326.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.676.000,00	153.350.000,00	3.326.000,00

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan realisasi keuangan, diharapkan pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan tetap berpedoman pada Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disepakati dan ditetapkan.

Bandar Lampung, Januari 2025

**KEPALA BADAN**



**Drs. M. FIRSADA, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001